

Implementasi Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement terhadap Defisitnya Neraca Perdagangan Sektor Non-Migas Indonesia-Jepang 2008-2012

Rizky Wendi Firdaus – 070710198

Program Studi S1 Hubungan Internasional, Universitas Airlangga

ABSTRACT

Indonesia Japan Economic Partnership Agreements also Known as IJEPA has lead Indonesia and Japan to a bilateral agreement in economic. IJEPA has three pillars, Liberalism, Facilitation and Cooperation. From those Pillars both Indonesia and Japan hopes that they will have a great benefit from it. At the fact when IJEPA has been applied Japan make a good fortunate to sent their products to Indonesia but for Indonesia, instead has a good benefit to the economic after the IJEPA took place IJEPA has lead Indonesia to had a great escalation on Import from Japan, meanwhile the products from Indonesia still can't compete in Japan domestic market so the Indonesia export can not have the equal in Indonesia Balance of Trade.

Keywords: *Bilateral Agreement, Liberalism, Facilitation, Cooperation, Balance of Trade.*

Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia Jepang, juga dikenal sebagai IJEPA telah mendorong Indonesia dan Jepang mencapai perjanjian bilateral di bidang ekonomi. IJEPA memiliki tiga pilar, Liberalisme, Fasilitasi dan Kerjasama. Dari pilar-pilar tersebut, Indonesia dan Jepang berharap bahwa mereka akan memiliki manfaat besar dari itu. Pada kenyataannya ketika IJEPA telah diterapkan, Jepang beruntung untuk mengirimkan produk mereka ke Indonesia tapi untuk Indonesia, sebaliknya, memiliki manfaat yang buruk bagi ekonomi setelah IJEPA berlangsung. IJEPA telah menyebabkan Indonesia untuk memiliki eskalasi besar pada impor dari Jepang, sementara produk-produk dari Indonesia masih tidak bisa bersaing di pasar domestik Jepang sehingga ekspor Indonesia tidak dapat memiliki nilai yang sama di Neraca Perdagangan.

Kata-Kata Kunci: *Perjanjian bilateral, liberalisme, fasilitasi, kerjasama, neraca perdagangan.*

Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) merupakan sebuah perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Jepang dalam hal perekonomian yang lebih kompleks daripada *Free Trade Area (FTA)*. IJEPA sendiri merupakan perjanjian sejenis keempat oleh Jepang yang merupakan perwujudan dari Kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Jepang sebagai perwujudan CEPAs (*Comprehensive Economic Partnership Agreements*) dengan negara-negara yang tergabung dalam *Association South east Asia Nation (ASEAN)* (www.mofa.go.jp). IJEPA sendiri berawal dari proposal pembentukan FTA (*Free Trade Area*) secara bilateral yang coba ditawarkan oleh Perdana Menteri Junichiro Koizumi kepada Presiden Megawati ketika Presiden berkunjung ke Tokyo pada tanggal 22-25 juni 2003 (*Joint statement on japan-Indonesia Summit Meeting, www.mofa.go.jp*). Dalam *Joint Announcement by the Prime Minister of Japan and the President of the Republic of Indonesia on the Possibility of the Economic Partnership Agreement between Japan and Indonesia* yang diumumkan pada tanggal 24 juni 2003, Megawati dan Koizumi sepakat untuk melakukan pertemuan pendahuluan untuk mendiskusikan kemungkinan pembentukan EPA tersebut. Pertemuan pertama diadakan di Tokyo dengan pembahasan pandangan masing-masing pihak terhadap FTA pada 8 september 2003.

Pada pertemuan APEC di *Pnom Penh* Kamboja tanggal 20-21 November 2004, SBY secara resmi menyampaikan kepada PM Koizumi mengenai pentingnya EPA sebagai alat untuk mempromosikan hubungan perekonomian yang lebih dekat diantara kedua negara. Selanjutnya pada tanggal 15 desember 2004, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang, Soichi Nakagawa menemui Menteri Perekonomian Indonesia Aburizal Bakrie untuk membicarakan rencana kesepakatan EPA tersebut (Rendi, 2004 www.bilaterals.org).

Keesokan harinya pada tanggal 16 Desember 2004, Nakagawa menemui menteri Perdagangan Republik Indonesia, Mari Elka Pangestu di Jakarta. Keduanya sepakat untuk membentuk sebuah kelompok studi bersama *Joint Study Group (JSG)* yang bertugas mengkaji dan memberikan penilaian menyeluruh (*full-scale assessment*) tentang kemungkinan pembentukan kesepakatan FTA, biaya dan keuntungan yang akan dihasilkan oleh kerjasama ini serta sektor-sektor apa saja yang akan dimasukkan ke dalam kerangka kerjasama tersebut. Setelah tiga pertemuan *Joint Study Group*, kedua Negara sepakat untuk melanjutkan pembicaraan ke tingkat negosiasi(www.bilaterals.org). Oleh sebab itu sebuah Kerja sama yang disepakati dalam kerangka IJEPA ditopang dengan tiga pilar utama yaitu mencakup di bidang; Pengembangan sumber daya manusia (*capacity building/cooperation*), Liberalisasi (*liberalization*) dan Fasilitasi perdagangan barang, jasa dan investasi (*facilitation*) telah memberikan angin segar bagi hubungan

Indonesia Jepang, Indonesia perlahan naik satu peringkat selama periode 2007 dan 2008 (Basri, 2009).

Framework penurunan tarif yang telah disepakati dalam IJEPA itu sendiri terdiri dari dua macam, yang pertama yaitu melalui penurunan Tarif preferensi umum dan *Tarif User Specific Duty Free Scheme* atau USDFS (Kementerian Keuangan, 2007). Investasi Jepang pun diharapkan akan bertambah sejalan dengan liberalisasi dan fasilitasi di bidang investasi yang sedang diupayakan oleh Pemerintah Indonesia. Sementara itu, peningkatan pertukaran antar masyarakat kedua negara dan daya saing industri Indonesia dapat diperkuat dengan kerjasama dari pihak Jepang. Melalui hal-hal tersebut, EPA Jepang-Indonesia nantinya akan semakin memperkuat hubungan kedua negara khususnya di bidang ekonomi.

Namun ketika IJEPA mulai diimplementasikan, ternyata ada sebuah hal yang cukup bertolak belakang dengan keinginan awal dari pemerintahan Indonesia utamanya dalam neraca perdagangan sektor non migas antara Indonesia dengan Jepang. Data yang didapat penulis pada tahun 2005 sampai dengan 2007 yang mempresentasikan sebelum adanya IJEPA, berturut-turut ialah sebagai berikut. Pada tahun 2005, neraca perdagangan Indonesia surplus 11 miliar US\$ lebih, dengan perbandingan neraca dari migas surplus 8 miliar lebih dan 2,6 miliar untuk sektor non migas. sedangkan di tahun 2006, neraca perdagangan surplus kembali di angka 16,2 miliar US\$ lebih yang terbagi atas 9,5 miliar dari sector non migas dan 6,7 miliar pada sector non migas. Selanjutnya ditahun 2007, neraca perdagangan Indonesia sampai angka 17 miliar US\$ dengan pembagian surplus 10 Miliar US\$ pada sector migas dan 6,6 miliar US\$ pada sector non migas (Kementerian Perdagangan Indonesia). Namun ketika IJEPA mulai di implementasikan ternyata terjadi sebuah anomali dari neraca perdagangan yang sebelumnya selalu surplus, utamanya dalam sector non migas Indonesia.

Penulis yang mencoba mempelajari isi dari kesepakatan EPA ini menemukan sebuah hal yang diluar dugaan. EPA yang dibentuk Jepang seharusnya menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*), ternyata memiliki kecenderungan yang negatif bagi Indonesia. Ada kecenderungan yang tidak lazim dan bertolak belakang dengan tujuan perjanjian IJEPA. Penulis melihat pada data terkait dengan neraca perdagangan Indonesia dengan Jepang dalam hal ekspor-impor migas dan non-migas, ternyata pada sektor non-migas, impor Indonesia terhadap Jepang mengalami penurunan bahkan hingga defisit. Untuk lebih jelasnya data yang ditemukan penulis merupakan fakta yang didapat langsung dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dapat dilihat dibawah ini dalam tabel 1.1 dan tabel 1.2

**Tabel 1. Neraca Perdagangan Indonesia Dengan Jepang
Periode 2005-2007**

No.	URAIAN	Dalam Ribu US\$		
		2005	2006	2007
I.	- Ekspor	18,049,139.7	21,732,123.0	23,632,796.8
	- Migas	8,487,356.5	9,533,555.9	10,539,950.6
	- Non Migas	9,561,783.2	12,198,567.1	13,092,846.2
II.	- Impor	6,906,255.2	5,515,773.7	6,526,673.9
	- Migas	13,877.2	27,799.5	54,013.3
	- Non Migas	6,892,377.9	5,487,974.2	6,472,660.6
III.	- Total Perdagangan	24,955,394.9	27,247,896.7	30,159,470.7
	- Migas	8,501,233.7	9,561,355.4	10,593,963.9
	- Non Migas	16,454,161.2	17,686,541.3	19,565,506.8
IV.	- Neraca	11,142,884.6	16,216,349.3	17,106,123.0
	- Migas	8,473,479.3	9,505,756.4	10,485,937.3
	- Non Migas	2,669,405.3	6,710,592.9	6,620,185.7

Sumber : Penulis (Diolah dari data Pusdatin Kementerian Perdagangan)

**Tabel 2. Neraca Perdagangan Indonesia Dengan Jepang
Periode 2008-2010**

URAIAN	TAHUN		
	2008	2009	2010
- Ekspor	27.743.856.152	18.574.730.417	25.781.813.648
- Migas	13.948.531.589	6.595.776.046	9.285.336.372
- Non Migas	13.795.324.563	11.978.954.371	16.496.477.276
- Impor	15.128.015.250	9.843.728.765	16.965.800.792

Implementasi IJEPa dalam Neraca Perdagangan Indonesia-Jepang

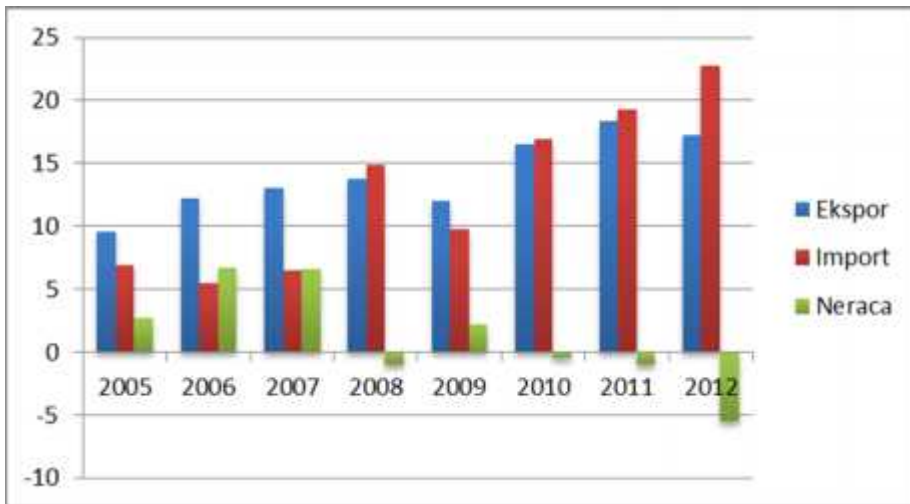
- Migas	263.300.714	33.215.048	55.100.686
- Non Migas	14.864.714.536	9.810.513.717	16.910.700.106
- Total Perdagangan	42.871.871.402	28.418.459.182	42.747.614.440
- Migas	14.211.832.303	6.628.991.094	9.340.437.058
- Non Migas	28.660.039.099	21.789.468.088	33.407.177.382
- Neraca	12.615.840.902	8.731.001.652	8.816.012.856
- Migas	13.685.230.875	6.562.560.998	9.230.235.686
- Non Migas	1.009.389.973	2.168.440.654	-414.222.830

Sumber : Penulis (Diolah dari data Pusdatin Kementerian Perdagangan)

Apabila melihat tabel-tabel diatas, pada tahun 2007 dimana penerapan IJEPa belum dilakukan nilai Ekspor komoditi Indonesia ke Jepang senilai US\$ 23,6 miliar dengan perincian US\$ 10,5 miliar untuk sektor migas dan US\$ 13,0 miliar untuk non-migas dan Impor Indonesia dari Jepang US\$ 6,5 miliar dengan perincian migas US\$ 54 juta dan non-migas US\$ 6,4 miliar sehingga jumlah perdagangan yang terjadi ditahun 2007 ialah US\$ 30,1 miliar dengan neraca surplus US\$ 17,1 miliar dengan perincian US\$ 10,4 miliar untuk sektor migas dan US\$ 6,6 miliar untuk sektor non-migas.

Lalu, tidak lama setelah Implementasi IJEPa yaitu tahun 2008 nilai Ekspor Indonesia naik menjadi US\$ 27,7 miliar dengan perincian US\$ 13,9 miliar untuk sektor migas dan US\$ 13,7 miliar untuk sektor non-migas. Impor Indonesia naik menjadi US\$ 15,1 miliar dengan perincian US\$ 263 juta untuk sektor migas dan US\$ 14,9 miliar untuk sektor non-migas. Sehingga total perdagangan yang terjadi tahun 2008 meningkat menjadi US\$ 42,8 Juta dengan neraca surplus 12,6 miliar dengan rincian surplus US\$ 13,6 miliar untuk sektor migas dan defisit atau minus US\$ 1,06 miliar untuk sektor non-migas. Disinilah yang menarik dari data diatas, sektor non-migas Indonesia dalam neraca perdagangan mengalami defisit di tahun 2008, ditahun 2009 neraca non-migas Indonesia kembali menguat dengan surplus US\$ 2,1 miliar, namun ditahun 2010 neraca untuk sektor non-migas Indonesia kembali defisit US\$ 414,2 juta. Di tahun ketiga atau pada 2011, dalam penerapan IJEPa, Indonesia kembali mengalami defisit di komoditi non-migas minus US\$ 990,8 Juta. Bahkan di tahun 2012 defisit Indonesia di dalam komoditi non-migas sampai dengan US\$ 5,490 Miliar. (Perhatikan Diagram dibawah ini)

Diagram 3. Ekspor-Impor Non Migas Indonesia dengan Jepang 2007-2012 (Dalam miliar US\$)



Dari data-data awal tersebutlah, tercermin bahwa didalam perjanjian IJEPA yang bertujuan dilaksanakannya perjanjian IJEPA didasarkan pada tiga pilar utama yaitu bidang pengembangan sumber daya manusia, liberalisasi dan fasilitasi perdagangan barang, jasa dan investasi yang nantinya akan memberikan keuntungan Indonesia diantaranya Indonesia diharapkan mendapat beberapa manfaat antara lain: akses yang lebih mudah atas pasar Jepang bagi produk-produk manufaktur Indonesia; akses yang lebih mudah bagi tenaga kerja Indonesia memasuki pasar Jepang yang sebelumnya cenderung tertutup; memelihara daya saing produk Indonesia di pasar Jepang dibandingkan produk negara-negara lain mengingat dikurangnya hambatan berupa tarif; konsumen Indonesia akan diuntungkan dengan semakin banyaknya alternatif produk-produk Jepang yang memasuki pasar Indonesia; dan yang terakhir terbukanya peluang lebih lanjut mendorong proses alih teknologi dari Jepang. Meskipun demikian, hingga perjanjian IJEPA ini tengah diterapkan, impor Indonesia pada sektor non-migas justru merugi. Hal inilah yang mendasari rumusan masalah penelitian ini yaitu, mengapa neraca perdagangan Indonesia Jepang di sektor non migas terus mengalami defisit setelah penerapan kerjasama bilateral IJEPA tahun 2008-2012 ?

Penulis mencoba meneliti, bagaimana hal ini bisa terjadi disaat implementasi IJEPA. Sebelum perjanjian IJEPA resmi diterapkan, tantangan bagi Indonesia adalah strategi dalam menembus pasar domestik Jepang serta aturan hambatan tarif yang ditetapkan oleh Jepang. Sebaliknya, Indonesia hanya menggunakan hambatan tarif untuk menyelamatkan pasar domestik serta mendapatkan pendapatan

dari perdagangan (*gain from trade*). Meskipun demikian, neraca perdagangan Indonesia pada masa sebelum diberlakukannya perjanjian IJEPA selalu mengalami surplus karena nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Indonesia bergantung pada pemberlakuan bea masuk untuk menekan jumlah nilai impor dibawah nilai ekspor. Setelah perjanjian ini diterapkan dan hambatan tarif (bea masuk) resmi dihapuskan, Indonesia tidak lagi memiliki strategi untuk menyelamatkan pasar domestiknya, sementara Jepang masih bisa mempertahankan pasarnya dengan strategi hambatan non tarif. Meskipun menganut sistem liberal, Jepang sendiri masih menggunakan sistem neo-merkantilisme dalam mekanisme perdagangannya. Hal ini tercermin dari perilaku masyarakatnya yang memegang prinsip *koku-san daiichi* (produk domestik adalah nomor satu). Bagi masyarakat Jepang, mereka memandang produk domestik mereka sebagai barang yang terjangkau, umum, dan dibutuhkan, dibandingkan dengan pandangannya terhadap produk internasional (Nagashima, 1970). Inilah yang menjadi dasar bagi strategi hambatan non-tarif yang digunakan oleh Jepang untuk menyelamatkan konsumen dan pasar dalam negerinya.

Perdagangan dengan Jepang tentu saja berarti bermain dengan standar tinggi, karena sejak sebelum diberlakukannya perjanjian IJEPA, Jepang merupakan negara yang mematok standar impor yang tinggi. Dengan demikian, dipahami bahwa standar menjadi isu politik yang mempengaruhi arus perdagangan kedua belah pihak (Steven & Brenner, 2001). Standar tersebut dibuat sebagai alat untuk tukar menukar informasi, untuk memastikan kualitas dan mencapai keinginan publik terhadap suatu produk tertentu (Wilson, 2002). Sehingga, pada praktiknya, meskipun hambatan tarif dalam perdagangan terus menurun, tetapi hambatan teknis dan peraturan terus meningkat untuk menghambat perdagangan. Hambatan non tarif ini dapat menimbulkan peningkatan biaya produksi untuk dapat memenuhi standar wajib yang diterapkan di pasar negara ekspor. Sedangkan mengenai standar sukarela seperti yang terdapat dalam *International Organization for Standardization* (ISO) 9000, negara berkembang mengalami kesulitan untuk menerapkan "*best-practice information on norms*" dan untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan dalam menerapkan metode proses dan produksi yang baik. Regulasi domestik mempengaruhi impor melalui persyaratan teknis, uji coba, sertifikasi dan pelabelan merupakan hal baru yang penting dalam liberalisasi.

Untuk menjawab permasalahan di atas, terutama strategi dalam mengatasi permasalahan standarisasi produk ekspor yang menyangkut pada besar atau kecilnya nilai perdagangan ekspor-impor, peneliti mendasarkan fokus pemikirannya pada konsep mengenai *Economic Partnership Agreement* (EPA) atau Perjanjian Kemitraan Ekonomi

sebagai dasar dari pembentukan IJEPA. Karena IJEPA sendiri didesain untuk meminimalisir ketimpangan-ketimpangan yang ada selama perdagangan kedua belah pihak sedang dilaksanakan, maka secara logis dapat diasumsikan bahwa pilar-pilar yang ada dalam IJEPA nantinya harus mampu memfasilitasi permasalahan isu-isu di atas. Dalam sub bab ini penulis mencoba membentuk kerangka analitis dengan memulai dari meneliti EPA dan IJEPA dan kemudian mencari anomali-anomali yang ada.

Kemitraan merupakan sebuah bentuk persekutuan, perkongsian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih dimana kemitraan tersebut diikat dalam sebuah perjanjian (*agreement*) yang memuat persetujuan yang dicapai secara mufakat tentang pertukaran janji dan persyaratan yang menimbulkan hubungan timbal balik dalam hubungan kemitraan tersebut, sehingga secara literal EPA adalah konsep mengenai persetujuan timbal balik dalam kemitraan mengenai kerjasama perekonomian. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Konsep EPA mulai digunakan dalam Perjanjian Internasional dan mulai menjadi tren perdagangan ketika konsep tersebut diusung dalam jalinan kerjasama ekonomi antara Uni Eropa dengan negara-negara di Afrika, Kepulauan Karibia, dan Pasifik (De Lombaerde & Puri, 2009). EPA sendiri kemudian menjadi sebuah perjanjian kompleks yang menuntut terjadinya integrasi ekonomi yang melibatkan partisipasi secara luas, yakni tidak hanya pada lingkup makro, kerjasama ini juga melibatkan seluruh komponen ekonomi di sektor mikro di kedua belah pihak. Perkembangan dunia yang semakin modern, menjadikan EPA sebuah sarana untuk terlibat dalam kompetisi perdagangan sekaligus sebagai pertahanan terhadap rintangan-rintangan akibat semakin rumitnya perubahan lingkungan perekonomian internasional.

“Economic Partnership Agreements are intensive alliances, signed by two or more countries, that provide for reciprocal economic integration and participation. The agreements have proven to be quite popular around the world in the beginning of the 21st century, with nations in Europe, Asia, Africa and the Pacific region all joining forces to survive and compete in today's turbulent international economic environment.”

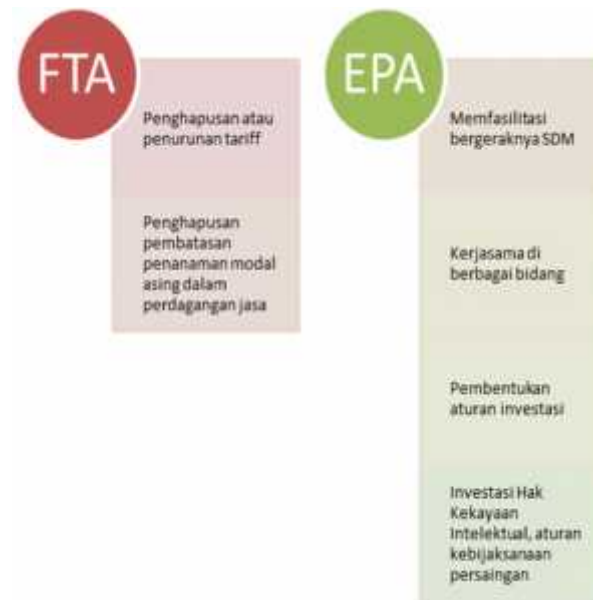
[Terdapat pada: <http://smallbusiness.chron.com/economic-partnership-agreement-3888.html>]

EPA sendiri merupakan sebuah tindakan perjanjian yang lebih komprehensif apabila dibandingkan dengan FTA¹. EPA bertujuan selain untuk memfasilitasi dua atau lebih negara yang ingin memiliki sebuah

¹ FTA ialah Free Trade Area yang mana mulai menjadi sebuah tindakan logis negara-negara untuk memperluas pasar mereka di seluruh kawasan.

sistem perekonomian yang saling terkait dan bersinggungan supaya lebih efisien, dimana FTA yang telah diterapkan WTO ternyata tidak cukup mampu dalam memfasilitasinya.² EPA sendiri ialah sebuah perjanjian internasional bagi penghapusan tarif yang dibebankan antara negara atau kawasan dan untuk menghapus peraturan dalam bidang penanaman modal asing pada bidang jasa perdagangan (Kementerian Keuangan, 2009).

Gambar 4. Perbedaan FTA dan EPA



Sumber: Penulis (diolah berdasarkan Japan External Trade Organization, 2009)³

Berbeda dengan FTA, EPA merupakan temuan baru yang kompleksitasnya melebihi perjanjian perdagangan yang diatur dalam WTO⁴. *Singapore Ministerial* menghasilkan tiga poin baru tentang perjanjian perdagangan yang sebelumnya tidak diatur dalam kesepakatan WTO. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar utama pembentukan kerjasama ekonomi dalam kerangka EPA, dimana didalamnya memuat integrasi perdagangan yang mengharuskan negara-negara maju memberikan konsesi kepada negara-negara kurang berkembang (*Less Developed Countries – LDCs*) berupa pembangunan

² Gap yang terjadi antara negara maju dan negara berkembang seringkali membuat negara berkembang akan kesulitan untuk bersaing dengan negara maju dalam kerangka FTA.

³ Selanjutnya penulis hanya akan menulis sebagai JETRO

⁴ Lihat gambar 1.1 dimana EPA lebih mengakomodir hubungan perekonomian antara Negara yang menerapkannya apabila dibanding dengan FTA

dan pengembangan kapasitas (*capacity building*) dan fasilitasi perdagangan (*facilitation*).

Konsep EPA diterapkan oleh negara Jepang dalam sebuah kerangka CEPAs (*Comprehensive Economic Partnership Agreements*). Dalam kerangka CEPAs Jepang mengajak beberapa negara-negara yang memiliki hubungan perekonomian secara bilateral dengan Jepang untuk bekerjasama membentuk sebuah perjanjian bilateral yang komprehensif. Sampai saat ini Jepang telah memiliki 13 perjanjian dalam kerangka EPA yang telah diterapkan dan Indonesia ialah salah satunya. Selain itu ada 10 perjanjian lagi yang masih dalam tahap negosiasi.⁵ (www.mofa.go.jp).

Konsep EPA oleh Indonesia sendiri didalam penerapan IJEPA (*Indonesia Japan Economic Partnership Agreement*) diartikan sebagai perjanjian internasional untuk menderogulasi peraturan-peraturan bagi penanaman modal dan pengendalian imigrasi sebagai tambahan dari isi kesepakatan antara Indonesia dengan Jepang. (JETRO, 2009).

De Lombaerde dan Puri (2009) mamaparkan dalam tulisannya bahwa EPA memiliki empat prinsip dasar utama yaitu *Partnership, Regional Integration, Development, WTO compatible*. Mereka mengambil contoh pada kasus EPA antara Uni Eropa dengan negara ACP (*African, Carribean and Pacific Countries*). *Partnership* yang dimaksud oleh De Lombaerde sendiri ialah pada dasarnya kedua negara akan mendapatkan hak-hak istimewa, contoh kasus dalam EPA antara Eropa dan Uni Eropa akan menghapuskan hambatan non-perdagangan, sementara dilain pihak negara ACP harus mengimplementasikan sebuah kebijakan untuk mengatasi kendala dalam hal pasokan serta mengurangi biaya transaksi baik pada sistem pajak atau fiskal. Dalam IJEPA sendiri *partnership* diterapkan dalam pilar *liberalization* yang memberikan konsesi-konsesi bagi Indonesia dan juga Jepang dalam hal ekspor impor barang dimana biaya masuk kedalam negeri untuk beberapa komoditi utama masing-masing negara akan dihapuskan hingga nol persen baik melalui skema fast track ataupun bertahap selama lima tahun (Kemkeu, 2009).

Hal senada juga diungkapkan oleh Alex Bowman, Matthias Bussed dan Silke Neuhaus dalam artikelnya yang berjudul *EU/ACP Economics Partnership Agreements: Impact, Options and prerequisites*.

⁵ 13 negara yang sudah menandatangani EPA dengan Jepang ialah Singapura, Mexico, Malaysia, Chile, Thailand, Indonesia, Brunei, Philipina, Swiss, Vietnam, India, Peru, ASEAN. Sedangkan yang masih dalam tahap negosiasi ialah Australia, Mongolia, Kanada, Kolombia, Japan-China-ROK, EU, RCEP, TPP, dan GCC dengan Korea yang masih di tunda perundingannya.

“For trade liberalization to be successful, complementary policies are required. There is a particular need for tax or fiscal reforms in countries where EPA-related short and medium-term losses in government revenue would be sizeable.”

Prinsip selanjutnya ialah *Regional Integration*, ini merupakan jantung dari perjanjian yang dimiliki EU dan ACP dimana jika negara ACP tidak bisa mengurangi tarif diantara mereka sendiri maka fasilitasi dalam perdagangan akan menyelesaikan permasalahan tersebut dan integrasi antar wilayah dalam hal perekonomian akan membantu negara ACP didalam perkembangannya kedalam sistem perekonomian dunia. Di dalam perjanjian IJEPA, *regional integration* merupakan sebuah perwujudan hubungan bilateral antara dua negara dengan kawasan yang berbeda yang mencoba berintegrasi secara perekonomian. Lalu dengan adanya skema fasilitasi oleh Indonesia untuk produk Jepang melalui USDFS, kedepan diharapkan produk-produk Jepang memiliki kemudahan dan keistimewaan ketika memasuki pasar Indonesia.

Di dalam prinsip *Development*, EPA akan berguna sebagai alat dalam pembangunan karena 48 negara dari 71 negara ACP tergolong negara kurang berkembang sehingga diharapkan nanti dengan adanya EPA maka bantuan akan mengangkat negara-negara itu sesuai dengan perjanjian *Cotonou*. Apabila melihat dari pilar yang mendasari perjanjian IJEPA maka pilar *cooperation* yang terwujud didalam MIDECC oleh Jepang kepada Indonesia merupakan pengimplementasian dari prinsip *development* itu sendiri dimana Jepang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas (*Capacity Building*) dari Industri-Industri yang ada didalam negeri Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk akhir melalui beberapa mekanisme yang terdapat didalam MIDECC⁶ sendiri agar produk-produk lokal maupun komoditi ekspor Indonesia mampu menembus pasar internasional, utamanya menembus pasar domestik Jepang yang memiliki tingkat kesulitan relatif tinggi untuk ditembus karena standarisasinya.

Dalam prinsip *WTO-Compatible*, EPA akan membangun aturan WTO, dan jika mungkin, melampaui WTO. Mereka akan menentukan hubungan perdagangan bilateral yang dimaksudkan untuk mengurangi semua hambatan praktek vertikal untuk perdagangan antara kedua belah pihak. Selain negosiasi memperkuat kapasitas ACP untuk pembicaraan perdagangan multilateral (De Lombaerde, 2008).

IJEPA yang memiliki tiga pilar utama yaitu mencakup di bidang; Pengembangan sumber daya manusia (*capacity building/cooperation*),

⁶ MIDECC ialah Manufacturing Industry development Center sebagai kompensasi Jepang untuk Indonesia dalam pilar *cooperation*.

Liberalisasi (*liberalization*) dan Fasilitasi perdagangan barang, jasa dan investasi (*facilitation*), ternyata memiliki kecenderungan hanya akan menguntungkan pihak Jepang. Pilar *Cooperation/Capacity Building* ternyata belum mampu memberikan efek yang maksimal bagi Indonesia.

Masih menurut De Lombaerde dan Puri (De Lombaerde, 2008) pilar *development* merupakan pilar yang akan memberikan keuntungan bagi negara-negara berkembang untuk lebih bisa berinteraksi dan masuk ke dalam sistem negara dengan industri yang lebih maju. Dengan adanya sebuah konsesi yang akan diberikan oleh negara maju bagi negara lainnya yang sedang berkembang, melalui beberapa skema yang telah ditentukan, diharapkan nantinya negara yang tergolong lebih terbelakang akan mampu meningkatkan kemampuannya dalam bidang industri.

Dalam penelitian ini pilar *development* yang diungkapkan oleh De Lombaerde merupakan bentuk dari *capacity building/cooperation* yang terdapat didalam IJEPA. *Capacity building* sendiri merupakan sebuah proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan (Brown, 2001). Penerapan pilar *cooperation* sangat erat kaitannya dengan penciptaan keunggulan kompetitif produk domestik Indonesia di negara Jepang yang dilakukan Indonesia melalui konsesi MIDEK hal tersebut. Menurut Porter, adalah hal yang bagus karena suatu negara juga dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Hal ini dikenal sebagai keunggulan kompetitif nasional. Sebagai contoh Cina menggunakan strategi *leadership cost* untuk mengeksport produk cukup berkualitas dengan harga yang relatif rendah. Strategi tersebut dapat diterapkan oleh Cina karena standar hidup rendah, sehingga pembayaran gaji dapat ditekan. Juga dengan cara perbaikan nilai mata uang Yuan dengan nilai lebih rendah dari Dollar (Porter, 1985).

India awalnya menggunakan strategi *leadership cost*, tetapi kemudian beralih pada strategi diferensiasi. Secara teknis, pekerja terampil berbahasa Inggris digaji dengan upah yang wajar. Jepang sendiri mengubah strategi keunggulan kompetitifnya. Pada tahun 1960, Jepang terkenal dengan produk elektronik yang terjangkau harganya. Namun, pada tahun 1980, Jepang mulai memperbaiki kualitas produk elektroniknya. Sebagai contoh adalah perusahaan elektronik raksasa, Sony.

Keunggulan kompetitif Amerika adalah inovasi. Perusahaan-perusahaan AS dapat membawa produk inovatif ke pasar lebih cepat dan lebih berhasil dibandingkan negara lain. Alasannya adalah basis konsumen domestik yang besar dan makmur. Sangat mudah untuk menguji ide-ide

produk baru, dan jika mereka menangkap, mereka dapat dipasarkan secara murah dan efektif.

Baik Indonesia maupun Jepang sama-sama cukup memahami keunggulan kompetitif nasional masing-masing, karena perjanjian kerjasama ekonomi antara kedua negara ini sebelumnya juga pernah dilakukan dalam kurun waktu 50 tahun. Jepang memiliki keunggulan kompetitif di bidang ekspor otomotif dan industri manufaktur, dan Jepang sangat bergantung pada pasar domestik Indonesia mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak di mana hampir keseluruhan jenis angkatan kerjanya adalah pasar tenaga kerja (*labor intensive*) yang bergantung pada kecukupan lapangan pekerjaan. Industri manufaktur memberikan lapangan pekerjaan yang cukup memadai bagi pasar tenaga kerja di Indonesia yang berkembang tiap tahunnya, dan dengan tingginya jumlah angkatan kerja akan mempengaruhi tingkat konsumsi produk otomotif sebagai sarana mobilitas. Sementara itu, Indonesia memiliki keunggulan kompetitif berupa ekspor kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama industri bahan baku, migas dan tambang serta hasil perikanan.

Pendekatan pilar *development* dalam peningkatan keunggulan kompetitif nasional ini akan diaplikasikan oleh penulis untuk membandingkan komoditi-komoditi ekspor impor non migas antara Indonesia dengan Jepang yang secara langsung mempengaruhi nilai dari neraca perdagangan Indonesia. Selain itu keunggulan kompetitif nasional juga dapat menjelaskan strategi-strategi apa yang diterapkan oleh Jepang maupun Indonesia dalam skema IJEPA.

Secara teoritis, EPA merupakan jawaban dimana tantangan penghapusan tarif penghalang (*tariff barrier*) impor menyebabkan ketidakseimbangan kompetisi antara kedua belah pihak. Penghapusan bea masuk mulai dikenal ketika FTA diberlakukan oleh kedua belah pihak, dan secara otomatis, sisi negatifnya adalah negara tidak menerima pendapatan dari pajak bea masuk, namun bagi negara maju, hal tersebut bisa diatasi dengan strategi hambatan non-tarif (*non-tariff barrier*). Dalam kerangka perjanjian EPA, negara-negara maju boleh saja masih menggunakan strategi tersebut dengan tujuan untuk menyelamatkan pasar dalam negerinya atau menerima pendapatan secara lebih, namun mereka juga dituntut agar arus perdagangan bersifat kompetitif seimbang, dalam artian negara-negara maju memiliki tanggung jawab untuk menyetarakan kompetisi perdagangan melalui pembangunan kapasitas dan fasilitasi bagi mitra dagangnya yang dikategorikan dalam negara LDCs.

Jepang memandang Indonesia sebagai mitra strategis untuk memperluas pasarnya. Dengan melihat EPA sebagai tren baru dalam

perdagangan internasional, penerapan IJEPA diartikan sebagai perjanjian internasional untuk menderegulasi peraturan-peraturan bagi penanaman modal dan pengendalian imigrasi sebagai tambahan dari isi kesepakatan antara Indonesia dengan Jepang. (JETRO, 2009).

Secara teoritis, sisi positif dari diberlakukannya IJEPA, Indonesia dijanjikan oleh Jepang bahwa kompetisi perdagangan akan berlangsung secara seimbang. Jepang memiliki tanggung jawab untuk memberikan konsesi berupa pembangunan kapasitas dan fasilitasi perdagangan bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas ekspornya sesuai dengan standar pasar domestik Jepang. Namun pada praktiknya, pembangunan kapasitas ini diberikan dengan syarat di mana Penanaman Modal Asing (PMA) dari Jepang tidak dibatasi secara regulasi oleh pemerintah Indonesia. PMA ini sendiri lebih banyak berupa pembuatan pabrik otomotif di Indonesia, yang mana bahan mentah dari Indonesia kemudian diekspor untuk diolah di Jepang menjadi bahan baku utama penyokong industri otomotif tersebut seperti suku cadang. Penyelarasan pembangunan kapasitas ini memiliki target bahwa produk-produk bahan baku mentah yang akan masuk ke pasar domestik Jepang harus sesuai dengan selera dan tingkah laku masyarakat Jepang.

Dari sisi praktisnya, sejak diberlakukannya IJEPA dari tahun 2008 hingga kini, neraca perdagangan Indonesia masih mengalami defisit, padahal seharusnya konsesi berupa peningkatan kapasitas dan fasilitasi perdagangan yang diberikan oleh Jepang mampu mendorong ekspor Indonesia meskipun secara gradual atau bertahap. Dengan demikian, terjadi sebuah anomali di mana yang seharusnya pemberlakuan salah satu pilar yang telah disebutkan di atas sebagai bentuk konsesi untuk meringankan beban persyaratan layak ekspor, malah bisa jadi menekan kuota ekspor atau justru meningkatkan kuota impor, sehingga neraca mengalami ketimpangan yang begitu besar

Daftar Pustaka

Buku

- Arifin, Sjamsul, dkk. (eds.). 2007. *Kerja sama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Bowman, Alex. Bussed, Matthias & Neuhaus, Silke. 2005. *EU/ACP Economics Partnership Agreements: Impacts Options and Prerequisites*. *Intereconomics* [pdf]

- Budhi, Rizky Satya. 2007. *Integrasi Perdagangan dan Keuangan ASEAN plus Three (APT)*. ASEAN Secretariat. [Pdf]. Terdapat pada: www.aseansec.org [Diunduh pada 20 April 2013].
- Chaplin, C.P. 1989. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Coulombis, Theodore A. & Wolfe, James H., 1990. *Introduction to International Relations: Power and Justice*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Darmadi, Budi www.merdeka.com/otomotif/indonesia-kejar-peringkat-1-produksi-mobil-asean.html. [diakses pada 12 Desember 2013]
- De Lombaerde, Philippe & Puri, Lakshmi. 2009. *Aid To Trade: Global and Regional Perspectives*. s.l.[pdf]: Springer.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2008. *Power Point Press Release IJEPA*. Jakarta: Depkeu.
- Departemen Luar Negeri Indonesia, 2007 *Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*. [Pdf]. Terdapat pada: http://www.indonesia.go.id/id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=4697. [Diunduh pada 1 mei 2013].
- Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional & Japan International Corporation Agency. 2008. *Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi edisi 1-3*. Jakarta. Departemen Perdagangan Republik Indonesia.
- Groom, A.J.R. & Light, Margot. (eds.) 1999. *Contemporary International Relations: A Guide to Theory*. London: New York Press.
- JETRO, 2009, *Bagaimana Menikmati Preferensi Tarif Melalui EPA/FTA (Saat Mengimpor Dari Jepang)*. s.l.: Departemen Ekonomi Perdagangan dan Perindustrian Jepang.
- Kaplinsky, Raphael & Morris, Mike. 2000. *A Handbook For Value Chain Research*. s.l.: University of Sussex Institute of Development Studies.
- Kementerian Keuangan, 2007. *IJEPA (Indonesia Japan Economic Partnership Agreement)*. Jakarta: Kemenkeu
- Kementerian Keuangan, 2009. *IJEPA (Indonesia Japan Economic Partnership Agreement)*. Jakarta: Kemenkeu
- Morgenthau, H.J & Thomson, Kenneth W. 2010. *Politik Antar Bangsa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nagashima, A. 1970. A Comparison of Japanese and US Attitudes Towards foreign product. *Journal of Marketing*. 34,68-74.
- Pass, Christopher & Lowes, Bryan. n.d. *Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Ke-2*. s.l.: Penerbit Erlangga.
- Pelkmans, Jacques. 2006. *European Integration: Method and Economic Analysis*. Pearson Education Limited.
- Porter, Michael. 1985. *Competitive Advantage*. New York: The Free Press.
- Roy, S.L. 1995. *Diplomasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Rudy, Teuku May. 2002. *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung: Refika Aditama
- Wendt, Alexander. 1987. *Agent-Structure Problems in International Relations Theory*. [Online]. JSTOR Online Journal, vol. 41 no. 3 hal 3. Terdapat pada: <http://links.jstor.org>. [Diakses pada 24 Maret 2013].
- Wilson, John S. 2002. *Standard, Regulation and Trade (WTO Rules and Developing Country Concern), Development Trade and The WTO: A Hand Book*. Washington DC: World Bank.

Internet

- Anon, n.d., *Economic Partnership Agreement*. [Internet]. Terdapat pada: <http://smallbusiness.chron.com/economic-partnership-agreement-3888.html> [Diakses 14 Agustus 2013]
- Anon, [Internet] terdapat pada www.verind-ptsj.com/n/ijepa/index.php [diakses 1 Agustus 2013]
- Anon, kerjasama kebijakan midec [Internet] terdapat pada <http://www.halojepang.com/kerjasamakebijakan/7253-midec> [diakses pada 19 September 2013]
- Anon, 2010 [Internet] terdapat pada www.beritasore.com/2010/07/06/ri-%E2%80%93-jepang-sepakat-kembangkan-empat-sektor-industri/. [Diakses 12 September 2013]
- Anon, Pemanfaatan fasilitas ijepa kurang optimal terdapat pada <http://www.indonesiainancetoday.com/read/41989/Pemanfaatan-Fasilitas-IJEPA-Kurang-Optimal>. [diakses pada 19 september 2013]
- Anon, 2013 [Internet] Ijepa diharapkan bisa perluas kesempatan bisnis. Terdapat pada <http://mindcommonline.com/ijepa-diharapkan-bisa-perluas-kesempatan-bisnis/>. [Diakses 19 September 2013]
- Basri, Faisal. 2009. *Hubungan Ekonomi Indonesia-Jepang*. [Internet]. Terdapat pada <http://ekonomi.kompasiana.com/2009/10/31/hubungan-ekonomi-indonesia-jepang> [Diakses pada 2 Mei 2013].
- Ebihara, Yang Mulia Shin. 2007. *Jepang Bantu Memperkuat Daya Ekspor UKM Indonesia*. [Internet]. Terdapat pada <http://www.aksesdeplu.com/Jepang%20membantu%20ukm%20indo.htm>, [Diakses pada 26 Maret 2013].
- Kholis, Arif Nur. 2007. *Hubungan Ekonomi Indonesia Jepang Saat Ini Lemah dan Rapuh*. [Internet]. Terdapat pada http://www.muhammadiyah.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=706&Itemid=2 [Diakses pada 1 mei 2013].
- Ministry of Foreign Affairs of Japan terdapat pada (<http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/index.html>) diakses pada 1 desember 2013]
- Liputan6.nd Otomotif paling kuasai fasilitas pembebasan bea masuk ijepa.[internet]. terdapat dalam

<http://bisnis.liputan6.com/read/532953/otomotif-paling-kuasai-fasilitas-pembebasan-bea-masuk-ijepa> [diakses pada 19 september 2013]

Widyahartono. Bob. 2010. *IJEPa Perlu Langkah Implementasi*. [Internet]. Terdapat pada: <http://www.antaraneews.com/berita/1271008549/ijepa-perlu-langkah-implementasi> [Diakses pada 1 mei 2013].